



JURNAL BASICEDU

Volume 9 Nomor 5 Tahun 2025 Halaman 1549 - 1558

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah

Vania Martha Yunita^{1✉}, Subagya²

Universitas Sebelas Maret, Indonesia^{1,2}

E-mail: vaniamarthay@staff.uns.ac.id¹, subagya60@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian ini menganalisis hambatan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia melalui desain survei deskriptif potong lintang. Pengumpulan data menggunakan angket yang terdiri dari butir tertutup dan terbuka dengan uji validitas isi melalui expert judgment. Subjek sebanyak 156 sekolah dari 28 provinsi berpartisipasi, terdiri atas 71 sekolah dasar, 59 sekolah menengah pertama, dan 26 sekolah menengah atas. Hasil analisis deskriptif menunjukkan delapan hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni keterbatasan tenaga pendidik khusus, minimnya sarana prasarana, belum optimalnya pendanaan, rendahnya kerja sama/pemahaman orang tua, kurangnya perhatian pemerintah daerah, terbatasnya bimbingan teknis, lemahnya pemahaman guru, dan faktor lain-lain. Tiga hambatan dengan proporsi tertinggi adalah kekurangan guru pendidikan khusus, keterbatasan sarana prasarana, dan minimnya pendanaan. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang berfokus pada rekrutmen dan pengembangan guru, pengalokasian anggaran khusus, serta perbaikan aksesibilitas untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Hambatan, Implementasi Inklusif

Abstract

Inclusive education is an educational model that emphasizes equality, participation, and respect for diversity. This study analyzes the barriers to the implementation of inclusive education in Indonesia through a descriptive cross-sectional survey design. Data collection used a questionnaire consisting of closed and open-ended items with content validity testing through expert judgment. A total of 156 schools from 28 provinces participated, consisting of 71 elementary schools, 59 junior high schools, and 26 high schools. Descriptive analysis results show eight major barriers to the implementation of inclusive education, namely the limited number of special educators, lack of infrastructure, suboptimal funding, low cooperation/understanding from parents, lack of attention from local governments, limited technical guidance, weak understanding among teachers, and other factors. The three obstacles with the highest proportions were the shortage of special education teachers, limited infrastructure, and insufficient funding. These findings emphasize the need for policies that focus on teacher recruitment and development, the allocation of special budgets, and improved accessibility to strengthen the implementation of inclusive education in Indonesia.

Keywords: Inclusive education, Barriers, Inclusive implementation

Copyright (c) 2025 Vania Martha Yunita, Subagya

✉ Corresponding author :

Email : vaniamarthay@staff.uns.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10712>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 9 No 5 Tahun 2025
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Pergeseran pendekatan dalam memandang individu berkebutuhan khusus secara sosial saat ini berubah dalam tiga dekade terakhir hal ini terjadi seiring dengan adanya regulasi dan peraturan baru mengenai individu berkebutuhan khusus dengan diberlakukannya The United Nations (UN) “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” (CRPD) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) (Genova, 2015). Pendidikan inklusif menjadi fokus kebijakan pendidikan tingkat internasional yang menjamin kesetaraan pendidikan bagi anak tanpa maupun dengan disabilitas. Sebelum diberlakukan kebijakan ini, sudah ada beberapa kali deklarasi dan kebijakan mengenai individu dengan disabilitas. Tak hanya itu, UNESCO telah mengeluarkan Deklarasi Salamanca yang ditandatangani oleh 92 negara yang berkomitmen untuk melawan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus dan menciptakan komunitas yang lebih terbuka dengan atau tanpa disabilitas serta kebijakan “*Education For All*” (EFA) dikeluarkan untuk menjamin semua anak dapat memperoleh Pendidikan terlepas dari latar belakang maupun memiliki disabilitas atau tidak (Centre for Services and Information on Disability, 2020; Sari & Hendriani, 2021) Kebijakan dan deklarasi yang telah dikeluarkan tersebut memperkuat dasar hukum diselenggarakannya pendidikan inklusi bagi negara-negara yang berada di bawah naungan PBB dan negara-negara yang juga ikut menandatangani Deklarasi Salamanca. Namun pada kenyataannya, ada banyak sekali hambatan dan tantangan yang dialami selama penyelenggaraan sekolah inklusi.

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada perhatian yang semakin meningkat terhadap pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Di Indonesia, pemerintah telah mengakui pentingnya pendidikan inklusif dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung implementasinya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Komitmen tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum, dengan tujuan agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama teman sebayanya di sekolah reguler. Lebih jauh lagi pendidikan inklusif juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai salah satu agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*), yang menempatkan isu kesetaraan dan aksesibilitas sebagai prioritas pembangunan pendidikan (Purbasari et al., 2022). Melihat dari regulasi-regulasi yang muncul menjadi titik balik bahwa Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip internasional tetapi juga berupaya mengintegrasikannya dalam kebijakan nasional guna menjamin terpenuhinya hak anak tanpa diskriminasi sehingga dapat tercapainya layanan pendidikan yang bermutu dan setara.

Tentunya dalam menerapkan prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif agar semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan merasa diterima menghadapi berbagai tantangan yang berulang di lapangan. Perlu adanya penyesuaian dalam proses penyelenggaraan pendidikan sekolah pada umumnya menjadi sekolah inklusif (Agustina & Zayyadi, 2023). Hal ini tentunya berkaitan dengan kesiapan sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Prinsip umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, memperhatikan kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan khususnya kesiapan penerimaan peserta didik (PPDB) baru berbasis inklusif (Asdaningsih & Erviana, 2022). Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik.

Pelaksanaan implementasi pendidikan inklusif memiliki tantangan tersendiri diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengubah persepsi dan membangun kesadaran tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan (Shutaleva et al., 2023). Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia juga dihadapkan pada kendala kebijakan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola kelas

inklusif masih menjadi kendala utama (Wulandari & Hendriani, 2021). Di samping itu permasalahan lain berupa keterbatasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas masih terbatas yang berdampak pada aksesibilitas peserta didik belum sepenuhnya terjamin (Ummah et al., 2023). Dukungan pendanaan yang belum merata juga berdampak pada rendahnya kualitas layanan, terutama di sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kebijakan (Tyas Pratiwi et al., 2022). Meskipun ada kebijakan nasional yang mendukung pendidikan inklusif, pelaksanaannya masih bervariasi di berbagai daerah. Terdapat perbedaan dalam pendekatan, prioritas, dan sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan inklusif di setiap wilayah (Apriyani & Gustianto, 2015)

Realitas yang terjadi di lapangan masih jauh dari kondisi ideal yang tercantum dalam kebijakan dan deklarasi yang sudah disepakati oleh banyak negara. Banyak pertanyaan yang muncul tentang mengapa praktik pendidikan inklusi di lapangan menjadi begitu sulit diterapkan, walaupun kebijakan dan deklarasi telah tertulis dan disepakati oleh banyak negara. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, tetapi umumnya terbatas pada satu jenjang pendidikan atau satu wilayah tertentu. Kebaruan dari studi ini terletak pada cakupannya yang lebih luas, yakni menganalisis hambatan implementasi pendidikan inklusif di 28 provinsi dengan membandingkan kondisi pada lintas jenjang (SD, SMP, dan SMA). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, memetakan perbedaan hambatan antar provinsi, serta menganalisis kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan. Kontribusi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memperkuat basis bukti dalam pengambilan kebijakan, menyusun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, serta memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah dalam mengembangkan layanan pendidikan inklusif yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif potong lintang untuk memetakan hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas di Indonesia. Data dikumpulkan dari 156 sekolah inklusif di 28 provinsi (71 SD, 59 SMP, dan 26 SMA) yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kesediaan berpartisipasi. Instrumen penelitian berupa angket dengan butir pertanyaan tertutup dan terbuka. Butir tertutup disusun mengacu pada kerangka (UNESCO, 2017) yang mencakup delapan dimensi hambatan pendidikan inklusif yaitu kompetensi guru, sarana prasarana, pendanaan, penerimaan peserta didik baru berbasis inklusi, kurikulum, dukungan masyarakat, manajemen sekolah, dan kebijakan daerah dengan skala nominal (ya/tidak; ada/tidak) yang disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di Indonesia. Validitas isi diuji melalui expert judgment tiga pakar pendidikan luar biasa. Selain itu, disertakan dua butir terbuka untuk menggali pengalaman konkret dan penjelasan tambahan dari responden. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form, identitas sekolah dijaga kerahasiaannya dan penelitian telah mendapat persetujuan etik. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Data kualitatif dari jawaban terbuka dianalisis dengan pendekatan tematik melalui tahap pengkodean, kategorisasi, dan penarikan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penyebaran angket hambatan sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi di Indonesia, data di bawah ini dipilih berdasarkan dari sebaran pada tiga jenjang Pendidikan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Tabel 1. Daftar jumlah partisipan/sekolah

No.	Provinsi	Jenjang Pendidikan		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1.	Aceh	16	6	-

No.	Provinsi	Jenjang Pendidikan		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2.	Banten	2	6	-
3.	Bengkulu	1	1	-
4.	D.I Yogyakarta	1	3	-
5.	DKI Jakarta	1	1	3
6.	Jawa Tengah	24	19	2
7.	Jawa Barat	4	14	3
8.	Jawa Timur	2	1	2
9.	Kalimantan Barat	1	-	-
10.	Kalimantan Selatan	1	2	-
11.	Kalimantan Timur	1	-	-
12.	Kalimantan Utara	-	-	1
13.	Kep. Bangka Belitung	1	1	-
14.	Riau	2	2	1
15.	Lampung	1	1	3
16.	Maluku	1	-	-
17.	NTB	3	-	-
18.	NTT	3	-	-
19.	Sulawesi Selatan	3	1	-
20.	Sulawesi Tenggara	1	-	1
21.	Sulawesi Barat	-	-	1
22.	Sulawesi Tengah	-	-	1
23.	Sumatera Barat	1	-	2
24.	Sumatera Selatan	1	1	2
25.	Sumatera Utara	-	-	1
26.	Bali	-	-	1
27.	Gorontalo	-	-	1
28.	Jambi	-	-	1
Jumlah		71	59	26

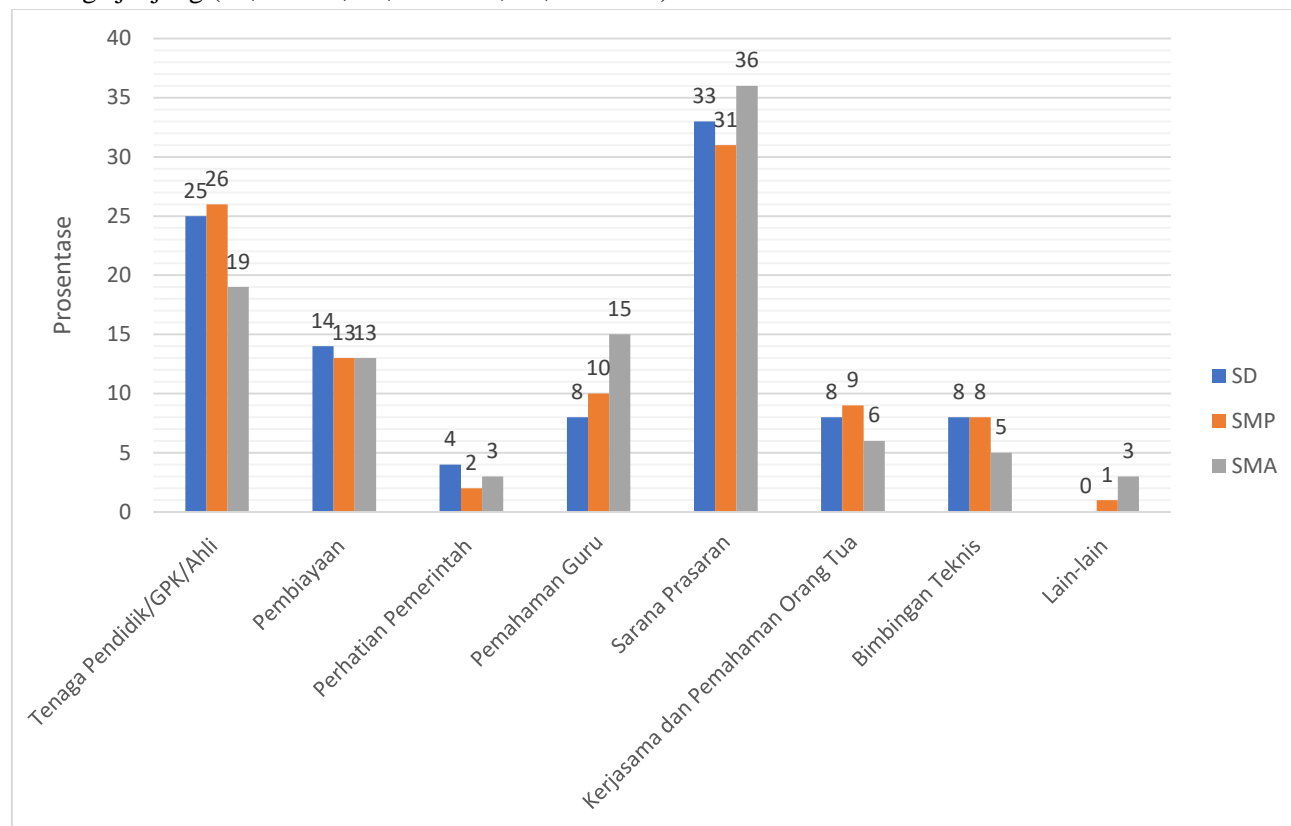
Terdapat 156 sekolah di 28 Provinsi di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner hambatan pelaksanaan implementasi Pendidikan inklusi di Indonesia. Seluruh data yang diperoleh dilakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tabel ringkas hasil data

No.	Hambatan	SD (n=71)	SMP (n=59)	SMA (n=26)
		%	%	%
1	Tenaga Pendidik/GPK/Ahli	25	26	19
2	Pembiayaan	14	13	13
3	Perhatian Pemerintah	4	2	3
4	Pemahaman Guru	8	10	15
5	Sarana Prasaran	33	31	36
6	Kerja sama dan Pemahaman Orang Tua	8	9	6
7	Bimbingan Teknis	8	8	5
8	Lain-lain	0	1	3

Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan yang paling banyak dilaporkan pada semua jenjang adalah keterbatasan sarana prasarana, yang dialami oleh 33 sekolah dasar (46,5%), 31 sekolah menengah pertama (52,5%), dan 36 sekolah menengah atas (69,2%). Hambatan berikutnya adalah kekurangan tenaga pendidik khusus atau guru pendamping, terutama menonjol pada SMP (44,1%) dan SMA (73,1%), meskipun proporsinya

lebih rendah di SD (35,2%). Kendala pembiayaan juga cukup sering disebutkan, dengan proporsi relatif serupa di ketiga jenjang (19,7% SD; 22,0% SMP; 50,0% SMA).



Grafik 1. Prioritas Hambatan

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa masalah sarana prasarana dan ketersediaan tenaga pendidik menjadi hambatan dominan dalam implementasi pendidikan inklusif di semua jenjang, dengan variasi tertentu yang lebih menonjol pada sekolah menengah.

Hambatan jenjang sekolah dasar

Jenjang sekolah dasar terdiri dari 71 partisipan atau sekolah, dari data tersebut didapatkan 40 sekolah menyatakan terkendala pada kekurangan tenaga pendidik khusus atau tenaga ahli. 54 sekolah menyatakan terkendala pada kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi baik dari segi ruang sumber maupun media untuk pembelajaran. Pada kendala pembiayaan terdapat 23 sekolah yang menyatakan hal tersebut, pendanaan untuk sekolah Pendidikan inklusi masih belum ada. Kendala selanjutnya 14 sekolah menyatakan kurangnya Kerja sama dari orang tua karena pemahaman dari orang tua tentang anak berkebutuhan khusus dan Pendidikan inklusi yang masih kurang. Selain itu perhatian pemerintah termasuk dalam kendala tersebut, terdapat 7 sekolah menyatakan bahwa pemerintah setempat masih kurang menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan program Pendidikan inklusi. 12 sekolah menyatakan bahwa tidak adanya bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Pendidikan inklusif sehingga berpengaruh terhadap administrasi penyelenggaraan program inklusif. Kemudian kendala selanjutnya 12 sekolah menyatakan masih kurangnya pemahaman pada guru atau warga sekolah terhadap Pendidikan inklusif sehingga berpengaruh terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus.

Hambatan jenjang sekolah menengah pertama

Jenjang sekolah menengah pertama terdiri dari 59 partisipan atau sekolah, dari data tersebut didapatkan 40 sekolah menyatakan terkendala pada kekurangan tenaga pendidik khusus atau tenaga ahli. 47 sekolah menyatakan terkendala pada kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi baik dari segi

ruang sumber maupun media untuk pembelajaran. Pada kendala pembiayaan terdapat 29 sekolah yang menyatakan hal tersebut, pendanaan untuk sekolah Pendidikan inklusi masih belum ada. Kendala selanjutnya 14 sekolah menyatakan kurangnya kerja sama dari orang tua karena pemahaman dari orang tua tentang anak berkebutuhan khusus dan Pendidikan inklusi yang masih kurang. Selain itu perhatian pemerintah termasuk dalam kendala tersebut, terdapat 3 sekolah menyatakan bahwa pemerintah setempat masih kurang menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan program Pendidikan inklusi. 13 sekolah menyatakan bahwa tidak adanya bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Pendidikan inklusif sehingga berpengaruh terhadap administrasi penyelenggaraan program inklusif. Kemudian kendala selanjutnya 15 sekolah menyatakan masih kurangnya pemahaman pada guru atau warga sekolah terhadap Pendidikan inklusif sehingga berpengaruh terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus.

Hambatan jenjang sekolah menengah atas

Jenjang sekolah dasar terdiri dari 26 partisipan atau sekolah, dari data tersebut didapatkan 12 sekolah menyatakan terkendala pada kekurangan tenaga pendidik khusus atau tenaga ahli. 22 sekolah menyatakan terkendala pada kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi baik dari segi ruang sumber maupun media untuk pembelajaran. Pada kendala pembiayaan terdapat 8 sekolah yang menyatakan hal tersebut, pendanaan untuk sekolah Pendidikan inklusi masih belum ada. Kendala selanjutnya 4 sekolah menyatakan kurangnya kerja sama dari orang tua karena pemahaman dari orang tua tentang anak berkebutuhan khusus dan Pendidikan inklusi yang masih kurang. Selain itu perhatian pemerintah termasuk dalam kendala tersebut, terdapat 2 sekolah menyatakan bahwa pemerintah setempat masih kurang menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan program Pendidikan inklusi. 3 sekolah menyatakan bahwa tidak adanya bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Pendidikan inklusif sehingga berpengaruh terhadap administrasi penyelenggaraan program inklusif. Kemudian kendala selanjutnya 9 sekolah menyatakan masih kurangnya pemahaman pada guru atau warga sekolah terhadap Pendidikan inklusif sehingga berpengaruh terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus.

Pembahasan

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia telah mengalami perkembangan penting untuk mendorong penerapan pendidikan inklusif dan adil bagi semua siswa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua warga negara berhak atas Pendidikan bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya menyediakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif berarti penyelenggaraan pendidikan yang menjamin akses, partisipasi dan keberhasilan pembelajaran bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik, mental, sosial atau emosional (Alfaaroqi & Khoiruddin, 2020). Regulasi turunan pada Permendiknas No 70 Tahun 2009 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun dari hasil penelitian di lapangan, implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi hambatan yang berulang di berbagai jenjang pendidikan.

Tenaga pendidik sebagai bagian penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menjadi hambatan yang cukup dominan di berbagai jenjang terutama di jenjang SD dan SMP. Tidak adanya guru Pendidikan khusus di sekolah umum menjadi kendala bagi sekolah permasalahan yang juga banyak dialami dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yaitu kurangnya pengetahuan guru tentang sekolah inklusi dan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (Sari & Hendriani, 2021). Ditambahkan oleh (Forlin, 2018) dan (Woodcock et al., 2022) mencatat bahwa kekurangan guru terlatih merupakan isu global terutama di negara berkembang. Saat ini belum ada data empirik yang menyatakan jumlah guru pendidikan khusus yang berada di sekolah inklusif, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusmaryono, 2023) masih banyak sekolah

inklusif yang belum memiliki guru pendidikan khusus. Tidak adanya guru Pendidikan khusus di sekolah umum menjadi kendala bagi sekolah permasalahan yang juga banyak dialami oleh negara-negara dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yaitu kurangnya pengetahuan guru tentang sekolah inklusi dan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (Sari & Hendriani, 2021). Guru kurang memahami bagaimana cara memberikan pemahaman yang tepat kepada siswa dengan ketunaan, seperti tuna rungu dan tuna netra (Genova, 2015). Selain itu, pelatihan guru yang tidak memadai atau tidak efektif di sekolah inklusif terus menjadi masalah yang dihadapi banyak negara, baik negara berkembang maupun maju. Pelatihan yang diberikan hanya sekedar formalitas dan tidak memperhitungkan dampak atau perbaikan pasca pelatihan (Abongdia et al., 2015). Kurangnya pelatihan guru menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Donath et al., 2023). Kurangnya pemenuhan kebutuhan tenaga ahli atau guru pendidikan inklusif ini dapat berdampak kepada aktivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga membutuhkan pelatihan yang komprehensif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan pendidikan inklusif adalah kurangnya sumber daya yang memadai (Bhatnagar & Das, 2014). Hal ini mencakup ketersediaan ruang kelas yang sesuai, fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, dan tenaga terlatih untuk menunjang kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Beberapa sekolah masih belum ramah bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi peserta didik dengan disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas (Jauhari et al., 2022). Hal ini berhubungan dengan pendanaan yang khusus bagi sekolah inklusif yang masih belum diakomodasi oleh pemerintah sehingga pihak penyelenggara masih enggan dalam menyelenggarakan program inklusif. Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran ini sering kali tidak mencakup semua kebutuhan yang ada, seperti penyediaan alat bantu, pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas (Nafarin et al., 2025). Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan Pendidikan inklusif yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus (Jia et al., 2022). Ditambahkan oleh (Farashati et al., 2025) berdasarkan analisisnya terhadap distribusi dana BOS menyatakan bahwa pendekatan pembiayaan pendidikan yang lebih responsif dan adil, sistem ini dapat berperan sebagai alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan tanpa pengecualian. Masalah aksesibilitas tidak bisa lepas dari pembiayaan, pemerintah perlu menyalurkan dana BOS Afirmasi atau BOS Inklusi yang lebih spesifik, serta memastikan mekanisme transfer daerah mendukung pengadaan layanan inklusif dan bekerja sama dengan tenaga ahli di lapangan.

Permasalahan ekonomi juga menjadi hambatan dalam pendidikan inklusif. Biaya yang tinggi terkait dengan pemberian dukungan dan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sering kali menjadi kendala bagi keluarga maupun sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang berkualitas (Juntak et al., 2023). Prasangka masyarakat terhadap siswa berkebutuhan khusus merupakan hambatan besar bagi pendidikan inklusif (Sharma et al., 2017). Dalam beberapa kasus, masyarakat belum memahami situasi dan potensi siswa berkebutuhan khusus sehingga menimbulkan penolakan dan diskriminasi serta menyulitkan mereka mengakses pendidikan inklusif (Kawser et al., 2016). Perlu adanya pemahaman dari semua sektor, kolaborasi antara orang tua dan sekolah juga membentuk sebuah dukungan yang konsisten bagi anak, karena apa yang dipelajari di sekolah dapat diterapkan dan didukung di rumah (Hasan et al., 2024).

Tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan kerja sama dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pendidikan inklusif dapat terwujud secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Para pejabat atau pemangku jabatan perlu menyadari kebijakan-kebijakan disabilitas yang dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh individu, dibandingkan hanya menerapkan kebijakan tanpa mengetahui realitas di lapangan (Bačáková & Closs, 2013). Tentunya harus ada kesesuaian yang harmonis antara kondisi ideal yang

tertuang dalam Petunjuk tersebut dengan kenyataan di lapangan, melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang peduli terhadap penyandang disabilitas dan para pemangku kepentingan. Diperlukan komitmen untuk mengalokasikan persentase anggaran, pendapatan, dan belanja daerah/negara untuk memungkinkan pembangunan dan penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tiga hambatan utama yaitu kekurangan guru, keterbatasan sarana, dan minimnya pendanaan merupakan isu prioritas yang perlu ditangani dalam kebijakan inklusi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan literatur, intervensi strategis yang direkomendasikan mencakup: (1) perluasan rekrutmen dan penempatan guru pendidikan khusus disertai program pengembangan profesional berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah reguler; (2) alokasi anggaran yang terdedikasi untuk pembangunan infrastruktur ramah disabilitas dan penyediaan media pembelajaran adaptif; (3) penguatan skema pendanaan seperti BOS Inklusi dengan mekanisme akuntabilitas yang transparan; (4) inisiatif pemberdayaan orang tua dan keluarga melalui program edukasi serta kemitraan sekolah dan masyarakat; dan (5) pengembangan mekanisme kolaboratif lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi disabilitas, untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi pendidikan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dengan tiga aspek dominan yaitu pada aspek tenaga pendidik, sarana prasarana, dan pembiayaan. Hambatan ini muncul secara konsisten di semua jenjang, meskipun proporsinya bervariasi, menunjukkan bahwa tantangan struktural masih menjadi faktor penyelenggaraan Pendidikan inklusif. Temuan tersebut menegaskan perlunya kebijakan yang lebih terarah pada penyediaan sumber daya manusia terlatih, penguatan alokasi anggaran khusus, serta perbaikan aksesibilitas fisik dan pembelajaran di sekolah. Dari sisi praktik hasil penelitian menyoroti urgensi pengembangan kapasitas guru reguler melalui pelatihan berkelanjutan, pengadaan fasilitas yang ramah disabilitas, serta mekanisme kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat keberlanjutan program. Dengan demikian pada penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan dan realitas di lapangan sehingga dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abongdia, J.-F. A., Foncha, J. W., & Dakada, A. (2015). Challenges Encountered by Teachers in Identifying Learners with Learning Barriers: Toward Inclusive Education. *International Journal of Educational Sciences*, 8(3), 493–501. <https://doi.org/10.1080/09751122.2015.11890271>
- Agustina, E., & Zayyadi, M. (2023). Kemampuan Literasi Numerasi Siswa di Sekolah Inklusi. *Apotema : Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 9(1), 15–22.
- Alfaaroqi, K. U., & Khoiruddin, & M. A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif dan Kendalanya di SDN Betet 1 Kota Kediri Implementation of Inclusive Education and Its Control in SDN Betet 1 Kota Kediri. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 1–16.
- Apriyani, M. E., & Gustianto, R. (2015). Augmented Reality sebagai Alat Pengenalan Hewan Purbakala dengan Animasi 3D menggunakan Metode Single Marker. *Jurnal Infotel - Informatika Telekomunikasi Elektronik*, 7(1), 47. <https://doi.org/10.20895/infotel.v7i1.29>
- Asdaningsih, F. H., & Erviana, V. Y. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi SD Negeri Wirosaban. *Jurnal Inovasi dan Manajemen Pendidikan*, 2(1), 21–39. <https://doi.org/10.12928/jimp.v2i1.4916>
- Bačáková, M., & Closs, A. (2013). Continuing Professional Development (CPD) as a Means to Reducing Barriers to Inclusive Education: Research Study of The Education of Refugee Children in the Czech

- 1557 *Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah* – Vania Martha Yunita, Subagya
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10712>
- Republic. *European Journal of Special Needs Education*, 28(2), 203–216.
<https://doi.org/10.1080/08856257.2013.778108>
- Bhatnagar, N., & Das, A. (2014). Regular School Teachers' Concerns and Perceived Barriers to Implement Inclusive Education in New Delhi, India. *International Journal of Instruction*, 7(2), 89–102.
- Centre for Services and Information on Disability. (2020). *Inclusive Education in Practice: A Guide for Teachers*. <https://www.csid.org/publications/inclusive-guide>
- Donath, J. L., Lüke, T., Graf, E., Tran, U. S., & Götz, T. (2023). Does Professional Development Effectively Support the Implementation of Inclusive Education? A Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*, 35(1), 1–28. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09752-2>
- Farashati, A., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). *Pembiayaan Pendidikan Inklusif: Kajian Literatur Terhadap Dukungan Dana bagi Anak Berkebutuhan*. 10(2), 740–745.
- Forlin, C. (2018). *Teacher Education for Inclusion: Changing Paradigms and Innovative Approaches*. Routledge.
- Genova, A. (2015). Barriers to Inclusive Education in Greece, Spain and Lithuania: Results from Emancipatory Disability Research. *Disability and Society*, 30(7), 1042–1054.
<https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075867>
- Hasan, L. M. U., Nurharini, F., & Hasan, I. N. H. (2024). Kolaborasi antara Guru Bahasa Arab, Orang Tua dan Terapis dalam Mendukung Pembelajaran Bahasa Arab Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(1), 44–54.
<https://doi.org/10.58737/jpled.v4i1.260>
- Jauhari, M. N., Sambira, & Idhartono, A. R. (2022). Pengoptimalan Aksesibilitas Fisik bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Kanigara*, 2(1), 264–269.
<https://doi.org/10.36456/kanigara.v2i1.5171>
- Jia, L., Tan, R., & Santi, M. (2022). Teachers' Understanding of Inclusive Education: Comparing Perspectives in China and Italy. *Asia Pacific Journal of Education*, 00(00), 1–13.
<https://doi.org/10.1080/02188791.2022.2066628>
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>
- Kusmaryono, I. (2023). Faktor Berpengaruh, Tantangan, dan Kebutuhan Guru di Sekolah Inklusi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.30659/pendas.10.1.12-23>
- Nafarin, W., Eljohn, G., Sari, Y., Haryaka, U., & Mulawarmana, W. G. (2025). Strategi Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi: Solusi Dukungan Finansial Berkelanjutan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 717–729. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1408>
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, 7(1), 50–58. <https://doi.org/10.26740/jp.v7n1.p50-58>
- Sari, C. N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan Pendidikan Inklusi dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis dari Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 97.
<https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>
- Shutaleva, A., Martyushev, N., Nikonova, Z., Savchenko, I., Kukartsev, V., Tynchenko, V., & Tynchenko, Y. (2023). Sustainability of Inclusive Education in Schools and Higher Education: Teachers and Students with Special Educational Needs. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/su15043011>
- Tyas Pratiwi, L., Nur Maghfiroh, M., Septa Andika, D., Nur Marcela, I., & Faza Afifah, A. (2022). Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), 314–318. <https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i2.704>

- 1558 *Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah* – Vania Martha Yunita, Subagya
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10712>
- Ummah, R., Safara, N. S. T., Kurnilasari, A. R. U., Dimas'udah, H. R., & Sukma, V. A. M. (2023). Tantangan Atau Hambatan dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 02(01), 111–118.
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>
- Woodcock, S., Sharma, U., Subban, P., & Hitches, E. (2022). Teacher Self-Efficacy and Inclusive Education Practices: Rethinking Teachers' Engagement With Inclusive Practices. *Teaching and Teacher Education*, 117, 103802. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103802>
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 143–157.